BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Kerjasama trilateral Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam dalam menangani masalah kerusakan hutan di wilayah perbatasan Kalimantan Timur

Secara historis gagasan inisiatif *Heart of Borneo* (HoB) secara resmi diwacanakan dalam pertemuan para pihak antara Pemerintah Negara Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam yang mengusung tema *Three Countries – One Conservation Vision*, di Brunei Darussalam pada tanggal 5 April 2005. Dalam pertemuan tersebut telah disepakati, sebuah usulan agar ketiga Negara melakukan launching Inisiatif *Heart of Borneo* (HoB) pada pertemuan COP 8-CBD pada bulan Maret 2006 di Brazil. Pertemuan *Three Countries One Conservation Vision* di Brunei Darussalam tersebut kemudian, ditindaklanjuti oleh pertemuan-pertemuan berikutnya. Dalam setiap kali pertemuan yang diselenggarakan fokus agenda adalah mendorong kesepakatan di tingkat tiga Negara untuk segera mendeklarasikan Inisiatif *Heart of Borneo* (HoB) tersebut menjadi sebuah program.

Dengan proses demi proses yang panjang maka akhirnya komitmen tiga Negara yaitu Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam dapat dicapai dengan terselenggaranya Deklarasi *Heart of Borneo* (HoB) di Bali pada tanggal 12 Februari 2007. Deklarasi tersebut telah menjadi salah satu tonggak sejarah yang

sangat penting dalam upaya membangun pondasi kerjasama lintas negara dalam bidang konservasi dan pembangunan berkelanjutan.

Beberapa hal penting dari isi Deklarasi *Heart of Borneo* adalah :

1. Kesatuan visi konservasi dengan tujuan kesejahteraan rakyat ketiga negara;
2. *Heart of Borneo* adalah ikatan lintas batas negara yang bersifat sukarela yang berdasarkan atas kearifan lokal, pengakuan dan penghormatan terhadap hukum, kebijakan,peraturan yang berlaku di masing-masing negara serta memuat ketentuan dan kesepakatan lingkungan.
3. Ketiga negara bersepakat untuk bekerjasama atas prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan melalui penelitian,pemanfaatan berkelanjutan, perlindungan, pendidikan dan pelatihan serta kegiatan lain yang relevan dengan pengelolaan lintas batas, konservasi,dan pembangunan berkelanjutan wilayah yang tercakup dalam *Heart of Borneo*. (Dalam Artikel : Sekilas Tentang *Heart of Borneo* oleh: Samedi & Anis Aliati, www.ditjenphka.go.id/article_file/ tentang%20 Borneo%20_HoB_.pdf, diakses 22 Juli 2011).

4.1.1 Hasil *The 1st Heart of Borneo Trilateral Meeting*

Pada pertemuan trilateral pertama negara-negara *Heart of Borneo* (HoB) ini dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2007 di Rizqun International Hotel, Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, yang dipimpin oleh Deputi Kementrian Industri dan Sumber Daya Alam Brunei Darussalam dan dihadiri oleh delegasi

dari ketiga negara (Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam), adapaun beberapa catatan dari hasil pertemuan tersebut adalah berikut ini:

a) Deputi Menteri Industri dan Sumber Daya Alam Brunei Darussalam yang pada pertemuan itu selaku chairman mengemukakan keinginan Brunei Darussalam menjadi *Heart of Borneo Center* dengan adanya alasan bahwa Brunei Darussalam merupakan satu-satunya negara yang beribukota di Borneo, sehingga dianggap menjadi lokasi yang strategis untuk mengorganisir *Heart of Borneo* (HoB). Disamping itu saat ini Indonesia sudah ada ASEAN *Secretariate* dan di Malaysia ada *The Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area* (BIMP-EAGA) *Facilitation Centre*. Dan jika itu terjadi *Heart of Borneo Centre* akan dibiayai oleh Deputi Kementrian Industri dan Sumber Daya Alam, dan secara langsung Brunei Darussalam akan membiayai kegiatan *Center* tersebut selama 3 tahun, dan baru setelah itu Brunei Darussalam akan secara permanen membiayai 60% dari biaya-biaya yang diperlukan.

Rapat menghasilkan keputusan sebagai berikut:

1. Masing masing negara akan segera merumuskan *National Project Document*. Dokumen tersebut akan disampaikan pada pertemuan *The Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area* (BIMP-EAGA) *Senior Officials/Minister* mendatang (akhir 2007)

2. Usulan yang membahas tentang pembentukan sekretariat / *Heart of Borneo* Centre oleh Brunei Darussalam dan Indonesia akan disampaikan kepada otoritas yang relevan di setiap negara, dan akan dibicarakan pada pertemuan *The Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area* (BIMP-EAGA) *Senior Officials/Minister* mendatang.
3. Pada waktu itu pertemuan ini menerima tawaran Asian Development Bank (ADB) untuk melaksanakan misi bantuan teknis di 3 negara yang akan dilaksanakan pada Agustus 2007, sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing negara.
4. Selanjutnya adalah Malaysia akan menjadi penyelenggara *Heart of Borneo Expedition Series* pertama pada Juni 2008 di Sarawak. Indonesia akan menyelenggarakan lokakarya pengelolaan konservasi dan pembangunan secara lestari yang pertama pada tahun 2008. Konferensi Ilmiah *Heart of Borneo* untuk mendorong pemahaman yang lebih baik mengenai keanekaragaman hayati *Heart of Borneo* akan diselenggarakan oleh Brunei Darussalam pada awal tahun 2009.
5. Disepakatinya *The 2nd Heart of Borneo Trilateral Meeting* yang akan dilaksanakan di Pontianak , Kalimantan Barat pada Januari 2008.

4.1.2 Hasil *The 2nd Heart of Borneo Trilateral Meeting*

Pada pertemuan kali ini diadakan dengan tujuan untuk mempersiapkan dokumen berupa rencana aksi dari Inisiatif *Heart of Borneo* (HoB),. Pertemuan penting ini seperti biasa dihadiri oleh delegasi negara-negara yakni (Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam. Pada waktu itu delegasi Brunei Darussalam dipimpin oleh Mr. Hj. Saidin bin Salleh selaku Direktur Kehutanan, Departemen Kehutanan Kementrian Industri dan Sumber Daya Alam; sedangkan delegasi dari Indonesia dipimpin oleh Mr Noor Hidayat, selaku Direktur Konservasi Kawasan, Departemen Kehutanan Republik Indonesia, dan delegasi dari Malaysia dipimpin oleh Mr Norsham Abdul Latif dari Kementrian Lingkungan dan Sumber Daya Alam Malaysia. Dan yang memimpin pertemuan ini adalah Mr Tonny Soehartono, Direktur Konservasi Biodeversitas, Departemen Kehutanan, Republik Indonesia.

Pada pertemuan yang sekarang ini bertujuan untuk menentukan dan merundingkan draf dari *Strategic Plan of Action* (SPA) dari inisiatif *Heart of Borneo* supaya lebih efektif dalam implementasi *Heart of Borneo* . Penentuan draf yang dibahas akan dipersiapkan oleh pemerintah Indonesia dengan menerima masukan-masukan dari Malaysia dan Brunei Darussalam. Dan pertemuan ini sepakat untuk menetapkan keputusan akhir dari *Strategic Plan of Action* (SPA) yang berisi lima program, yaitu:

1. *Trans Boundary Management*;
2. *Protected Areas Management;*
3. *Sustainable Natural Resources Management;*

4. *Ecotourism Development; and*
5. *Capacity Building*

Program-program diatas tadi juga didukung oleh beberapa aksi yang disepakati dan diadopsi oleh ketiga negara pada *2nd Heart of Borneo Trilateral Meeting* .

Pada Pertemuan ini telah mencapai kesepakatan perjanjian dalam beberapa isu yaitu :

a. Mengamandemenkan dokumen dari *Strategic Plan of Action* inisiatif *Heart of Borneo.*
b. Menerima perubahan kata pada dokumen *Strategic Plan Of Action for the Heart of Borneo Initiatif.*
c. Mengahapus program pendanaan yang berkelanjutan dan sepakat dengan 5 program mengenai : *trans boundary management, protected areas, sustainable resource management, ecotourism dan capacity building.*
d. Menghapus isu yang bertujuan untuk aksi penolakan pembangunan dan mengendalikan kebakaran hutan.
e. Menghapus aksi mengenai perdagangan ilegal, termasuk isu mengenai keamanan.

Beberapa isu yang lain tidak dibahas dalam pertemuan ini, dan ketiga negara tersebut sepakat untuk membahasnya selama *2nd Heart of Borneo Trilateral Meeting*. Beberapa isu yang masih dibahas adalah mengenai batas waktu bagi penerapan implementasi yang telah disepakati tadi. Terakhir adalah pembangunan ekotoursit berupa promosi yang ada di wilayah *Heart of Borneo.*

4.1.3 Hasil *The 3rd Heart of Borneo Trilateral Meeting*

Pertemuan negara-negara Heart of Borneo yang ketiga ini dilaksanakan di kota Kinabalu, negara bagian Sabah, Malaysia pada tanggal 5-6 oktober 2009. Pada petemuan kali ini masing-masing negara memberikan update perkembangan program *Heart of Borneo* dan membicarakan beberapa isu penting yakni :

- *Institutional Arrangement and Modalities*
- Mekanisme pendanaan berkelanjutan untuk *Heart of Borneo* (termasuk program REDD1 sebagai salah satu alternatif pendanaan);
- Sistem informasi geografis program *Heart of Borneo* serta logo *Heart of Borneo*

Pertemuan yang dihadiri oleh para delegasi negara dari Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam ini dibuka secara resmi oleh Yang Berhormat Tan Sri Datuk Seri Panglima Joseph Kurup, yakni Deputi Mentri Sumber Daya dan Lingkungan Malaysia. Dan beliau menyatakan bahwa upaya konservasi lintas batas yang telah ada ini merupakan komponen penting yang perlu terus dipertahankan dalam rangka memastikan perlindungan dan konservasi hutan dataran tinggi Borneo.

Adapun perkembangan program yang disampaikan oleh masing masing negara pada pertemuan ini yakni :

a. Brunei telah membentuk Dewan Nasional *Heart of Borneo* (*Heart of Borneo National Council*) dan *Heart of Borneo Centre.*

b. Indonesia telah memiliki draft final Rencana Aksi Strategis Nasional sebagai landasan implementasi program Heart of Borneo di Indonesia dan bahwa kawasan *Heart of Borneo* telah dijadikan Kawasan Strategis Nasional (KSN) oleh pemerintah
c. Malaysia menyatakan bahwa Program *Heart of Borneo* di kawasan Sabah dan Sarawak merupakan salah satu program penting yang termasuk dalam *Ninth Malaysia Plan.*

Dan bagian pokok dari hasil pertemuan ini adalah pembahasan mengenai *Institutional Arrangements Modalities* yang merupakan pilar penting dalam implementasi program *Heart of Borneo* setelah ketiga negara menyepakati 5 program utama pada pertemuan trilateral sebelumnya di Pontianak tahun 2008. Khusus untuk isu ini, draf dokumen yang menjadi bahan diskusi bersama ketiga negara tadi dipersiapkan oleh Malaysia. Dan dalam pertemuan yang akan datang disepakati perlunya pendalaman lebih lanjut terhadap *Institutional Arrangements Modalities,* sehingga setelah pertemuan ini akan dibentuk kelompok kecil yang dimandatkan untuk membahas dan menyelesaikan isu-isu tersebut. Brunei Darussalam bersedia memfasilitasi dan menjadi tuan rumah untuk pelaksanaan *The 4th Heart Of Borneo Trilateral Meeting* yang secara tentatif akan dilaksanakan pada April 2010.

Indonesia mengusulkan pembahasan isu pendanaan berkelanjutan untuk program *Heart of Borneo* (HoB), dan didalamnya termasuk pula pertimbangan pentingnya mempromosikan Heart of Borneo sebagai kawasan prioritas *Reduction Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD*). Dan

akhirnya ketiga negara menyepakati hal ini untuk diskusikan lebih lanjut dalam pertemuan tiga negara yang mendatang dengan mempertimbangkan kepentingan masing-masing negara dan dinamika yang berlangsung terkait dengan isu kehutanan dan iklim ini. (http ://www.wwf.or.id/beritafakta/beritafakta/?11220/Denyutnya–Heart–of–Borneo-pada–Pertemuan–Trilateral-Ketiga Diakses 20 Juli 2011).

4.1.4 Hasil *The 4th Heart of Borneo Trilateral Meeting*

Pertemuan Trilateral *Heart of Borneo* kali yang keempat ini dilaksanakan di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam pada tanggal 19-23 April 2010. Rangkaian *Heart of Borneo Trilateral Meeting* yang ke-4 ini diawali dengan *Working Group Meeting on Institusional Arrangements and Modalities for Heart of Borneo* yang dilaksanakan pada hari pertama yakni tanggal 19 April 2010 antara perwakilan pemerintah ketiga negara. Untuk *Working Group* ini Indonesia dikepalai oleh Direktur Penataan Ruang Wilayah III Kementrian Pekerjaan Umum, Wahyono Bintarto dan Juru Bicara Kementrian Luar Negeri, Tjetjep Herawan. Selain itu diikuti pula oleh perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementrian Kehutanan, Kementrian Luar Negeri, Kementrian Pertahanan, Kementrian Pertanian, serta perwakilan KBRI untuk Brunei Darussalam.

Beberapa agenda yang dibahas adalah finalisasi draf "*Institutional Arrangements and Modalities of The Heart of Borneo Initiative*" serta beberapa isu yang akan dibahas dalam *the 4th Heart of Borneo Trilateral Meeting* yaitu:

Sustainable Financing for Heart of Borneo, Geographic Information Sytem (GIS) Working Group, dan logo Heart of Borneo.

4.2 Langkah-langkah yang ditempuh dalam penanganan masalah kerusakan hutan di wilayah perbatasan Kalimantan Timur

Heart of Borneo adalah merupakan program yang di koordinasi oleh pemerintah. Pengelolaan *Heart of Borneo* ada di tangan pemerintah dan didukung oleh masyarakat seperti lembaga-lembaga non pemerintah (NGO/LSM)), institusi pendidikan dan penelitian ataupun negara lainnya. Adapun proyek *Heart of Borneo* dinilai sebagai proyek yang tepat dalam mengatasi masalah kerusakan hutan-hutan di Borneo khususnya Kalimantan Timur. Hal ini karena Proyek *Heart of Borneo* merupakan proyek lingkungan di hutan Kalimantan pertama yang menggabungkan koordinasi lintas batas antara pemerintah Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam, dimana proyek-proyek sebelumnya biasanya hanya melibatkan LSM dan pemerintah lokal yang dominan di hutan Kalimantan, yaitu pemerintah Indonesia.

Adanya koordinasi lintas batas ini dipandang sebagai hal yang dapat mempermudah upaya perlindungan hutan di Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur. Karena selama ini upaya perlindungan selalu terbentur dengan masalah-masalah batas negara sehingga upaya yang ada hingga kini belum maksimal. Di Indonesia pada tingkat pusat telah dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) HoB Nasional yang diketuai oleh Asisten Deputi Urusan Kehutanan dari Kementrian Koordinasi Perekonomian (Menko Perekonomian) dan Sekretariat Pokja HoB

Departemen Kehutanan. Demikian dengan Kalimantan Timur yang memiliki Pokja *Heart of Borneo* tersendiri. Dan adapaun langkah-langkah yang dilakukan adalah dengan membuat atau menyusun *Strategic Plan of Action* (SPA)

4.2.1 *Strategic Plan of Action* (SPA)

Program *Heart of Borneo* dikembangkan dengan menggunakan aturan perundangan yang telah ada sebagai salah satu dasarnya. Karena *Heart of Borneo* ingin membangun komitmen politik para pihak untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan konservasi. *Heart of Borneo* tidaklah merubah kawasan untuk seluruhnya menjadi kawasan konservasi. *Heart of Borneo* juga akan menghargai komitmen-komitmen sebelumnya yang telah ada. Dalam mengimplememtasikan nya *Heart of Borneo* akan menggunakan dan menghargai peraturan perundangan yang terdapat di negara masing-masing. Program ini akan terus mendorong tumbuhnya komitmen terhadap pemanfaatan berkelanjutan dan konservasi dalam dukungan kebijakan terhadap penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan konservasi.

Rencana rinci fase implementasi *Heart of Borneo* dimulai pada tahun 2007, dengan fokus pada perencanaan aktifitas yang melibatkan para pemangku kepentingan dan merumuskan strategi pemenuhan dana jangka panjang yang berkesinambungan. Kerjasama ini mencakup kegiatan lintas batas antar tiga negara dan setiap negara secara individual dapat mengembangkan kegiatan masing-masing seperti :

- Melakukan inventarisasi, analisis kesenjangan,merumuskan dan melaksanakan program aksi *(action plan)*
- Melanjutkan aktivitas program yang sedang berjalan
- Melakukan konsultasi dengan pemangku kepentingan di tiga negara untuk mengidentifikasi prioritas kerja dan kesempatan investasi.
- Membangun kelembagaan *Heart of Borneo (HoB)* di tiga negara.
- Menentukan prioritas pembangunan lintas batas.

4.2.1.1 Rencana Aksi Nasional

1. Membangun manajemen sumberdaya kehutanan dan konservasi alam di kawasan yang dilindungi.
    a) Mengidentifikasi, menaksir dan menetapkan kawasan lindung lintas batas dalam rangka memperkuat pengelolaan kawasan lindung berbasis nilai budaya dan warisan alam, kemampuan tangkapan air dan kekayaan keanekaragaman hayati yg berada di kawasan perbatasan Kalimantan Timur.
    b) Meningkatkan sistem dan prosedur baku untuk operasional monitoring dan evaluasi dalam rangka pengelolaan kawasan lindung lintas batas, dan melaksanakan aktivitas monitoring dan evaluasi bersamaan, itu juga jika diperlukan.
    c) Mengembangkan dan meningkatkan sistem dan implementasi program pengelolaan kawasan lindung lintas batas secara

kolaboratif dengan melibatkan masyarakat lokal dan stakeholder lainnya yang berada di wilayah Perbatasan Kalimantan Timur.

d) Mengembangkan dan meningkatkan berbagai pendekatan untuk memperbaiki pengelolaan lahan dan vegetasi di kawasan yang diusahakan oleh masyarakat lokal di dalam atau berdekatan dengan kawasan lindung yang berada di wilayah Perbatasan Kalimantan Timur.

e) Menetapkan dan mempromosikan daftar kawasan lindung di wilayah perbatasan Kalimantan Timur.

2. Meningkatkan kebijakan lokal.

Kebijakan yang dilakukan dalam rangka penanganan wilayah perbatasan khususnya pembenahan sistem pengurusan hutan seperti :

a. Pembenahan status, kondisi dan pola pemanfaatan kawasan hutan dengan mendapatkan kepastian status lahan kawasan hutan secara *de jure* dan *de facto* di batas kawasan hutan dalam garis batas negara (Indonesia dengan Malaysia) dan dalam wilayah Indonesia bersifat bebas konflik dengan memantapkan areal kawasan hutan di wilayah perbatasan Kalimantan Timur.

b. Pembenahan sistem perlindungan hutan,

1) Intensifikasi pengawasan dan pengendalian peredaran hasil hutan

2) Pengendalian kebakaran hutan

3) Pengembangan sistem pengawasan partisipatif

4) Koordinasi penegakan hukum.

c. Pembenahan sistem kelembagaan pengurusan hutan dengan cara mengharmonisasikan dan menyempurnakan peraturan dan perundangan dalam bidang pengelolaan hutan di wilayah perbatasan Kalimantan Timur., dengan itu semua akan memperoleh perangkat peraturan perundangan yang lengkap dan harmonis antara peraturan pada Pemerintah Pusat dengan peraturan Provinsi dan Kabupaten

3. Mengimplementasikan prinsip pembangunan berkelanjutan melalui kegiatan penelitian.

   Meningkatkan dan memperkuat mekanisme dan panduan yang ada untuk memastikan implementasi praktik terbaik dalam pengelolaan sumberdaya alam, prinsip pemanfaatan berkelanjutan dan pendekatan ekosistem dalam pemanfaatan sumberdaya alam termasuk kehutanan, perkebunan, dan pertambangan di dalam wilayah kawasan perbatasan Kalimantan Timur. Selain itu dengan mengembangkan skema program rehabilitasi dan restorasi pada hutan-hutan yang tergradasi di dalam wilayah kawasan perbatasan Kalimantan Timur.

4.3 Pengaruh program *Heart of Borneo* (HoB) dalam menangani kerusakan hutan di wilayah perbatasan Kalimantan Timur

Kondisi hutan di wilayah perbatasan Kalimantan Timur pasca dilaksanakannya kerjasama *Trilateral Heart of Borneo* (HoB) mengalami berbagai perkembangan positif. Diantaranya, dapat dilihat dari adanya komitmen dari pemerintah daerah dengan menetapkan ‘Kaltim Green Policy’ untuk

berkontribusi bagi pengurangan emisi gas rumah sebesar 26% di tahun 2020, salah satunya melalui penanaman 14 juta pohon yang didukung oleh 14 kabupaten/kota di Kaltim serta untuk di Indonesia sendiri kawasan ini telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional telah menetapkan kawasan Jantung Kalimantan (Heart of Borneo/ HoB) sebagai salah KSN dengan pertimbangan lingkungan

4.3.1 Peningkatan Kebijakan Lokal : *Green Kaltim*

Berdasarkan pemaparan diatas Kebijakan *Green Kaltim* bertujuan untuk memberikan perlindungan sosial dan ekologis bagi masyarakat Kalimantan Timur serta memberikan jaminan jangka panjang terhadap keselamatan dan kesejahteraan masyarakat serta keberlanjutan lingkungan hidup. Kebijakan tersebut dibuat dengan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kalimantan Timur secara menyeluruh dan seimbang, baik secara ekonomi, sosial, budaya dan kualitas lingkungan hidupnya.
2. Mengurangi ancaman bencana ekologi, seperti banjir, longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan di seluruh wilayah Kalimantan Timur.
3. Mengurangi terjadinya pencemaran dan pengrusakan kualitas ekosistem darat, air dan udara di Kalimantan Timur
4. Meningkatkan pengetahuan dan melembagakan kesadaran seluruh pihak, baik pemerintah, swasta, serta masyarakat Kalimantan Timur, terhadap

kepentingan pelestarian sumberdaya alam terbaharui serta pemanfaatan secara bijak semberdaya alam tidak terbaharui.

Wilayah Kalimantan Timur adalah bagian dari *Heart of Borneo* (HoB), dengan kebijakan *Green Kaltim* semua pemnagku kepentingan dan pengambil kebijakan bertanggung jawab untuk mendukung program nasional menurunkan emisi 26% dalam upaya antisipasi pemanasan global dan mitigasi.

Dengan adanya *Green Kaltim* diharapkan adalah kondisi dimana Kalimantan Timur telah memiliki perangkat kebijakan dan *action plan* yang jelas tentang tata kelola pemerintahannya, serta program-program pembangunan yang memberikan perlindungan sosial dan ekologis terhadap masyarakat Kalimantan Timur, serta memberikan jaminan jangka panjang terhadap keselamatan dan kesejahteraan masyarakat serta keberlanjutan lingkungan hidup disekitarnya.

4.3.2 Penetapan Kawasan Strategis Nasional (KSN)

Selain berdampak pada kebijakan lokal, program *Heart of Borneo* (HoB) juga berdampak pada kebijakan tingkat nasional yaitu dengan ditetapkannya wilayah Kalimantan Timur yang merupakan kawasan *Heart of Borneo* (HoB) di Indonesia sebagai Kawasan Stategis Nasional (KSN) melalui peraturan pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Penetapan wilayah Kalimantan Timur sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) merupakan berdasarkan karena wilayah tersebut penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting secara nasional terhadap

kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan di lintas batas negara, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai wilayah warisan dunia.

Kawasan Strategis Nasional (KSN) merupakan kawasan budidaya/kawasan tertentu yang berskala besar dan berperan secara nasional maupun daerah. Kawasan Strategis Nasional merupakan kawasan yang didalamnya banyak berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap tata ruang di wilayah sekitarnya, kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya dan juga dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Adapun beberapa poin mengenai kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Nasional (KSN) adalah:

a) Pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, melestarikan keunikan bentang alam, dan melestarikan warisan budaya.
b) Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.
c) Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian nasional yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian internasional.
d) Pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
e) Pelestarian dan peningkatan sosial dan budaya bangsa.

f) Pelestarian dan peningkatan nilai kawasan lindung yang ditetapkan sebagai warisan dunia, cagar biosfer,dan ramsar; dan

g) Pengembangan kawasan tertinggal untuk mengurangi kesenjangan tingkat perkembangan antar kawasan. (*Sumber : peraturan pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional)*

Wilayah perbatasan Kalimantan Timur dengan negara-negara perbatasannya yang di tetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional adalah karena sebagian besar kawasan lindung dan kawasan konservasi dengan luas total 414.962 hektar , yang terdiri dari Hutan Lindung 79 hektar, Kawasan Budidaya Kehutanan 54.534 hektar, Kawasan Budidaya Non Kehutanan 55.780 Hektar dan Kawasan Konservasi Taman Nasional Kayan Mentarang 225.800 hektar.

Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur terus berupaya melakukan pembangunan daerah perbatasan, yang dikatakannya sebagai beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan komitmen membangun wilayah perbatasan Kalimantan Timur telah dilakukan bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan di wilayah Kalimantan Timur seperti negara-negara *Heart of Borneo* (HoB).

4.3.3 Keterlibatan Masyarakat

Dengan dilaksanakannya program *Heart of Borneo* (HoB), keterlibatan masyarakat lokal di kawasan tersebut juga mengalami peningkatan, sebelum adanya program tersebut masyarakat kurang peduli dengan alam, setelah adanya program tersebut masyarakat lebih peduli terhadap lingkungan. Peningkatan kepedulian masyarakat tersebut merupakan hasil dari *Payment for Environmental*

Service (PES) yang merupakan salah satu program *Heart of Borneo*. Dalam program *Payment for Environmental Service (PES)* adanya upaya pemberian insentif bagi masyarakat lokal yang melindungi, sekaligus mendapat keuntungan dari upaya perlindungan yang telah mereka lakukan untuk sumber daya di wilayah proyek *Heart of Borneo* (HoB). Pemberian *rewards* atau intensif tersebut merupakan suatu bentuk penghargaan terhadap masyarakat atas kepedlian serta keterlibatan terhadap upaya penjagaan sumber daya di wilayah perbatasan Kalimantan Timur.

4.4 Analisis pengaruh Program *Heart of Borneo* (HoB) dalam menangani kerusakan hutan di wilayah perbatasan Kalimantan Timur

Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa dalam Hubungan Internasional pada dasarnya merupakan interaksi antara aktor suatu negara dengan negara lainnya, yang kemudian interaksi tersebut dapat menjadi suatu kerjasama internasional.

Program *Heart of Borneo* (HoB) adalah salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara yaitu Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam dimana negara-negara tersebut merupakan negara-negara yang memiliki wilayah di hutan Kalimantan khususnya di wilayah perbatasan Kalimantan Timur.

Isu lingkungan bukan hanya menjadi permasalahan yang bisa diselesaikan oleh satu negara, dalam menyelesaikan isu tersebut perlu adanya peran serta dari negara-negara yang berdekatan secara geografis. Seperti halnya yang dilakukan

oleh Indonesia, Brunei Darussalam, dan Malaysia dalam menyelesaikan permasalahan kerusakan lingkungan di Borneo. Kerjasama tersebut menghasilkan kesepakatan pengelolaan secara bersama di kawasan Borneo khususnya kawasan perbatasan Kalimantan Timur.

Dengan adanya program *Heart of Borneo* (HoB), kerusakan hutan di kawasan perbatasan Kalimantan timur dapat ditangani yang ditandai dengan ditetapkannya kawasan Kalimantan Timur sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN).